

## KRISIS PENGUNGGSI EROPA 2014-2015

V.L. Sinta Herindrasti<sup>1</sup>

Dosen Program Studi Ilmu Hubungan Internasional  
Universitas Kristen Indonesia

### Abstract

*Political conflict and war in some parts of Middle East especially Syria have created the biggest wave of refugees to the continent of Europe through the frontline countries like Greece and Italy. During the year of 2014-2015 the UNHCR notes that there are 630.000 refugees entering Europe (that amount does not include the many who crossed a border undetected) and around 2600 become the victims of the hard journey especially those who went through the Mediterranean Sea. The phenomenon of immigration and refugees basically are raising some important question for the International Relations students, among other things are why those people decide to go to Europe? Why they did not go to the Arab states or Mediterranean states? How the European states response to these thousands of people who flocked in the same time without any sufficient materials to support their lives, like foods, clothes, even formal documents? What are the short, middle and long range actions taken by the European Union? Does EU has a solid commitment to solve this giant problems since the coming of immigrants with their specific situation culturally, economically, psychologically – that need really urgent support --will bring the impacts to the local people in their various aspects of life? How is individual state within European Union reacts to the refugee problem? This paper will focus on how the European Union as supra national institution of 28 member countries try to find solutions to the refugees problems as an impact of the unpredictable conflict and war especially in Syria and how the international actors in the world showing the sympathy and their helping hand through the real actions.*

---

<sup>1</sup> Master of Arts dalam International Studies: Asia Pacific Region School of Politics University of Nottingham, UK., Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIPOL Universitas Kristen Indonesia sejak 2014 dan Wakil Direktur Institute of ASEAN Studies (IAS) serta Editor Pelaksana Jurnal "Sociae Polites" Fisipol UKI

Key Words: Refugee, European Union Policy, the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), the International Organization for Migration (IOM)

## **Pendahuluan**

Menurut data the International Organization for Migration (IOM) diperkirakan terdapat sebanyak 750.000 pengungsi memasuki Eropa melalui laut tahun ini, meskipun jumlah pasti tetap tidak diketahui.<sup>2</sup> Dari segi kuantitas arus pengungsi ini menjadi masalah besar bagi Uni Eropa (UE) karena di satu pihak UE melalui berbagai perjanjiannya (perjanjian Schengen 1985, Perjanjian Maastricht 1992 dan Perjanjian Amsterdam 1997) telah memberi kemudahan perpindahan manusia antar negara anggota di wilayah Schengen; namun di lain pihak "keterbukaan" ini menjadi "bumerang" karena dengan berbagai alasan tidak setiap negara anggota UE dapat menerima imigran dalam jumlah besar. Dalam kasus khusus, masuknya imigran Suriah, Afghanistan, negara-negara Afrika akibat konflik Suriah juga menimbulkan dilema; di satu pihak Eropa terikat dengan pertimbangan normatif kemanusiaan "Hak Asasi Manusia" (*Human Rights*), namun di lain pihak "kemampuan" negara dari aspek sosial, keuangan, keamanan dan lapangan kerja tidak memungkinkan pemerintah negara-negara anggota UE menerima begitu saja para imigran.

Uni Eropa mempunyai berbagai konvensi dan protokol serta mekanisme dalam pengaturan terhadap pengungsi, baik mengacu kepada Konvensi Internasional (misalnya Konvensi 1951 dan Protokol 1967 berkaitan dengan status pengungsi dari UNHCR (the United Nations High Commissioner for Refugees)<sup>3</sup>; maupun mekanisme pengaturan internal EU dan negara inti.

Menghadapi gelombang pengungsi krisis Suriah/Timur Tengah, Uni Eropa mau tidak mau harus melaksanakan pengaturan baru dengan mengakomodasi aspirasi, kondisi dan kemampuan negara inti; sesuatu yang dalam prosesnya tidak

---

<sup>2</sup> <http://www.bbc.com/news/world-europe-34131911>

<sup>3</sup> Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugees Status Under the 1951 Convention and the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees. HCR/4/Eng/Rev.1. Reedited Geneva, January 1992, UNHCR 1979.

mudah. UE harus menghadapi negara inti yang bersikap keras dengan menolak kehadiran pengungsi (negara-negara Eropa Timur seperti Ceko, Hongaria, Slovakia' negara pintu masuk yang "berteriak" menuntut bantuan dan pembagian beban yang adil (Yunani, Italia) serta negara kuat seperti Jerman yang membuka pintu lebar-lebar bagi pengungsi serta tekanan internasional terutama lembaga internasional PBB, UNHCR dan hak asasi manusia (HAM) yang menuntut penanganan secara manusiawi karena menyangkut kehidupan "warga korban tak berdaya akibat perang". Solusi apa yang diusahakan Uni Eropa? Apakah solusi tersebut memuaskan semua pihak dan menyelesaikan masalah pengungsi? Paper ini mencoba melihat apa yang dilakukan Uni Eropa sebagai lembaga supranasional dalam menghadapi masalah pengungsi, setelah selama beberapa tahun harus menghadapi masalah besar yaitu krisis ekonomi (Yunani, Portugal) dan masalah yang lebih baru yaitu terorisme, berupa serangan Perancis 2015.

### **Seberapa Besar Masalah Pengungsi ?**

Berbagai cara dilakukan oleh para pengungsi untuk memasuki Eropa. Data IOM (International Organization for Migration) menunjukkan lebih dari 750.000 orang masuk ke Eropa antara bulan Januari-November 2015 sementara pada 2014 hanya terdapat 280.000 orang.<sup>4</sup> Berbagai rute baik melalui darat maupun laut<sup>5</sup> dipilih oleh para pengungsi dengan menempuh resiko yang membahayakan jiwa mereka.

---

<sup>4</sup> [Http://www.bbc.com/news/world-europe-34131911](http://www.bbc.com/news/world-europe-34131911)

<sup>5</sup> Ibid

## Peta 1: Rute Pengungsi Menuju Eropa

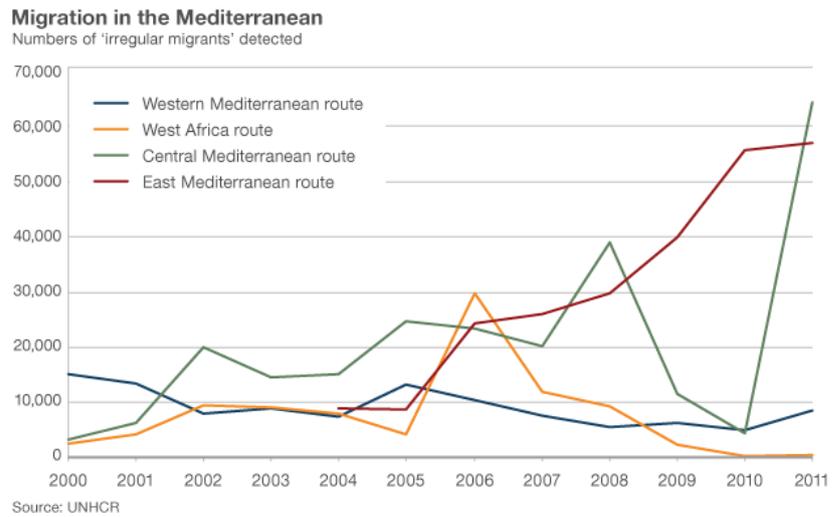


Sumber: <https://www.bbc.com/news/world-europe-24521614>

Jumlah pengungsi yang meninggal akibat kecelakaan di lautan Mediterania meningkat sejak Juni 2014 (2200 orang) disusul dengan kasus Lampedusa, Kepulauan Italia pada Oktober 2014, sebesar 336 orang tenggelam dalam pelayaran dari Libya dimana sebagian besar adalah warga Eritrea dan Somalia. Rute Mediterania Tengah menjadi semakin terkenal bagi pengungsi karena jarak yang pendek, meskipun kondisi laut lebih berbahaya. Berikut grafik migrasi melalui laut Mediterania selama periode 2000-2011.<sup>6</sup>

<sup>6</sup> <http://www.bbc.com/news/world-europe-24521614>

Grafik 1. Migrasi di Mediterania



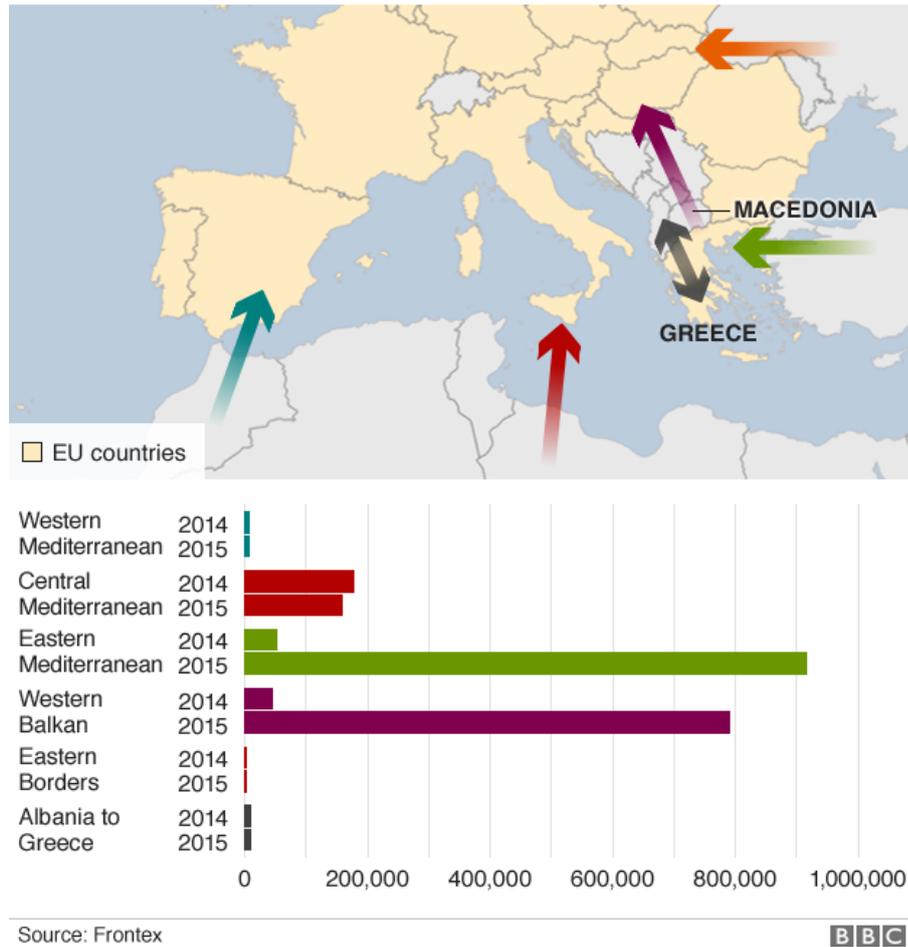
Sumber: UNHCR

Sementara Frontex<sup>7</sup> mendeteksi pergerakan migran masuk ke Eropa selama periode 2014-2015, dimana jumlah terbesar masuk melalui Mediterania Timur, Mediterania Tengah dan Balkan.

<sup>7</sup> [http:// www.bbc.com/news/world-europe-34131911](http://www.bbc.com/news/world-europe-34131911)

Peta 2. Migrasi Ilegal ke Eropa Periode 2014-2015

**Migrants detected entering the EU illegally, 2014-2015**



Sumber: Frontex

Menurut IOM, dilaporkan sejumlah lebih dari 2800 orang meninggal ketika melakukan penyeberangan dan total terdapat 3771 orang meninggal di Mediterania selama 2015.<sup>8</sup>

<sup>8</sup> <https://www.iom.int/news/iom-counts-3771-migrant-fatalities-mediterranean-2015>

Tabel 1. Perkiraan Migran dan Pengungsi Meninggal pada 2015 sepanjang Rute Mediterania

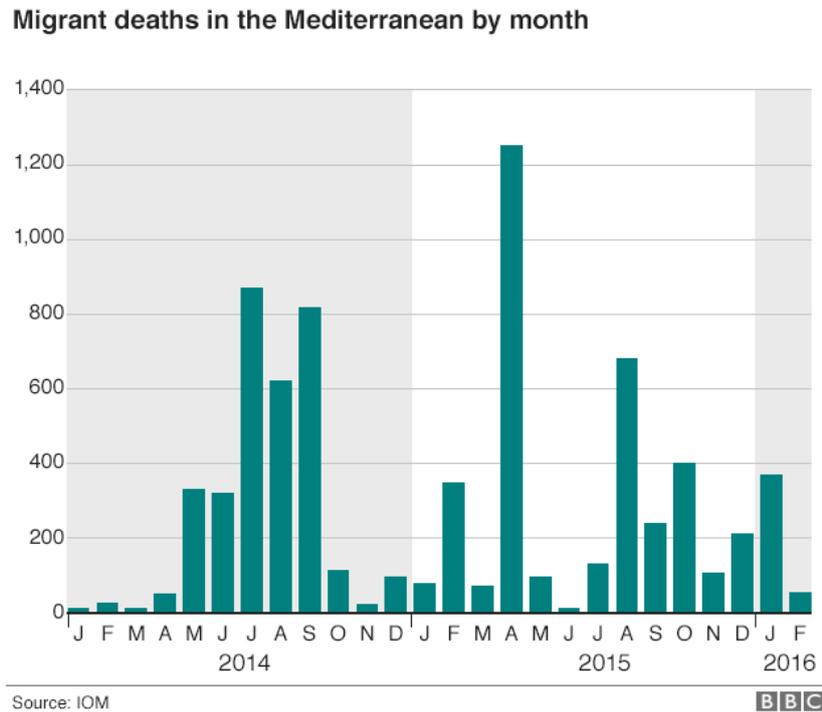
| <b>Rute Migrasi</b>  | <b>Kematian</b> |
|--|-----------------|
| Mediterania Tengah   | 2,892           |
| Mediterania Timur  | 805             |
| Mediterania Barat  | 74              |
| <b>Total</b>   | <b>3,771</b>    |
| An additional estimated <b>32</b> migrants died en-route to the Canary Islands |                 |

Sumber: <https://www.iom.int/news/iom-counts-3771-migrant-fatalities-mediterranean-2015>

Sementara data kematian migran per bulan selama periode 2014-2015 adalah sebagai berikut<sup>9</sup>

<sup>9</sup> <https://www.bbc.com/news/world-europe-34131911>

Grafik 2. Kematian Migran di Mediterania per Bulan



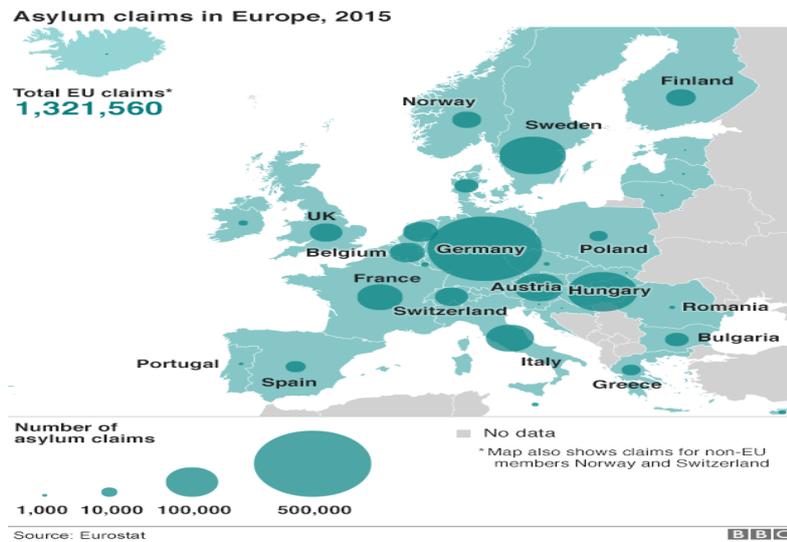
## Kebijakan Uni Eropa terhadap Krisis Pengungsi

Pengalaman Eropa akan pengungsi memberikan pembelajaran bahwa masalah pengungsi memang harus dibatasi dengan cara-cara manusiawi mengacu kepada komitmen secara internasional, namun juga sesuai dengan peraturan yang dibuat secara internal UE. Kebijakan masalah pengungsi di UE mendasarkan diri pada Deklarasi Universal mengenai hak Asasi Manusia (1948) termasuk mengakui hak-hak individu "lintas batas negara" (*across border*), pembentukan Dewan Eropa (The Council of Europe) pada 1949, serta pembentukan Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi (The United High Commissioner for Refugees-UNHCR) pada 1950.<sup>10</sup> Dengan demikian bersama dengan UNHCR sebagai pemegang mandat memimpin dan mengkoordinasi aksi internasional untuk melindungi pengungsi dan menyelesaikan masalah pengungsi di seluruh dunia serta melaksanakan kebijakan aplikasi suaka (*Asylum Policy*) sesuai keputusan Konferensi Geneva 1951.

<sup>10</sup> Paper Sinta Herindrasti, "Politik Pengungsi di Eropa: Dilema antara Norma dan Realitas". The 3<sup>rd</sup> Convention on European Studies, Yogyakarta 2014.

Dari sejumlah 750.000 (2015) pengungsi yang masuk Eropa menurut IOM lebih dari 700.000 mengajukan aplikasi suaka. Hingga akhir Oktober 2015, sebesar 331.000 mengajukan aplikasi ke Jerman dan 143.070 ke Hungaria.<sup>11</sup> Gambaran aplikasi suaka dan berbagai negara tujuan tergambar dalam data berikut<sup>12</sup>:

Peta 3. Pencari Suaka di Eropa



Sumber: Eurostat

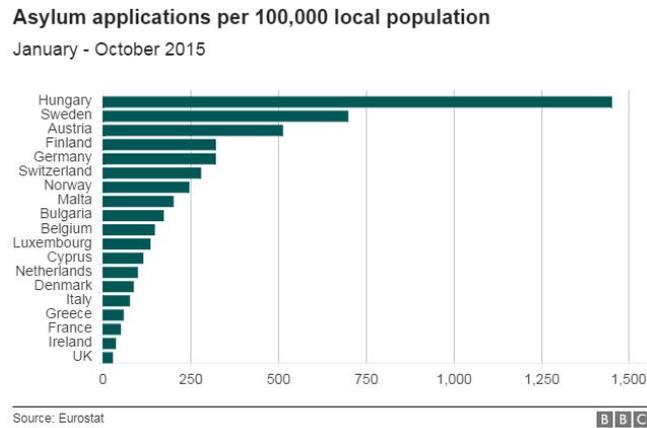
Namun jika dilihat dari jumlah aplikasi per penduduk, maka Hungaria menduduki tempat teratas, dimana terdapat lebih dari 1450 pengungsi per 100.000 penduduk lokalnya. Sementara Jerman hanya mencapai 323 dan Inggris 30 per 100.000 orang<sup>13</sup>.

<sup>11</sup> Ibid., menurut UNHCR pada Januari-Juli 2015, 28 negara anggota Uni Eropa telah menerima 437.384 aplikasi suaka dimana Jerman menerima 188.489, Hungaria 65.415, Swedia 33234, Italia 30223 dan Perancis 29834 permintaan. Aplikasi kebanyakan berasal dari Kosovo, Suriah, Afghanistan, Albania dan Irak. [www.businessinsider.co.id/map-of-europe-refugee-crisis-2015-9/](http://www.businessinsider.co.id/map-of-europe-refugee-crisis-2015-9/)

<sup>12</sup> Op.cit

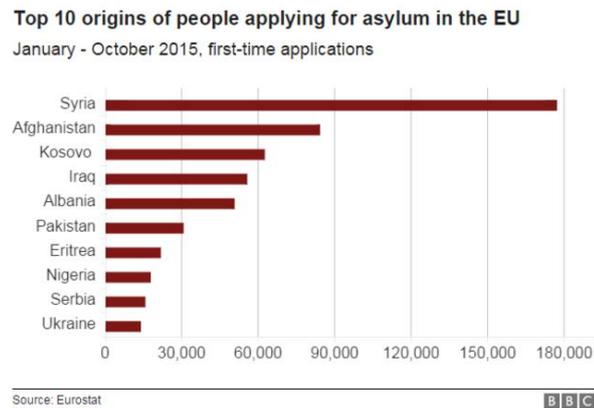
<sup>13</sup> Op.cit

Grafik 3. Aplikasi Pencari Suaka di Negara-Negara Eropa



Asal usul para pengungsi juga dapat digambarkan dalam data berikut, dimana jumlah terbanyak berasal dari Suriah dan kemudian disusul oleh negara-negara lain yang sedang mengalami konflik yaitu Afghanistan, Kosovo, Irak, Albania, Pakistan, Eritrea, Nigeria, Serbia dan Ukraina<sup>14</sup>.

Grafik 4. Sepuluh Negara Utama Asal Pencari Suaka



Sumber: Eurostat

Namun kebijakan suaka UE dalam kondisi normal, dimana jumlah pengungsi/pencari suaka bukan seperti dalam kasus pengungsi 2014-2015, tidak lagi memadai dan dapat dilaksanakan mengingat peningkatan jumlah yang sangat

<sup>14</sup> Idem

besar dan membutuhkan penanganan yang cepat dan adil diantara anggota UE. Sebagai gambaran UE mempunyai mekanisme CEAS (Common European Asylum System)<sup>15</sup> yang dalam praktiknya merupakan proses pemberian/penolakan pencari suaka yang dilaksanakan oleh negara inti sesuai dengan pertimbangan kepentingan dan keamanan masing-masing negara.

Gambar 1. Sistem Suaka Uni Eropa



Sumber: CEAS

## Respon Negara Inti

Di tengah berbagai ketegangan akibat arus pengungsi yang masuk perbatasan Eropa dan tidak dapat dibendung dengan regulasi normal, maka berbagai reaksi jangka pendek muncul dari negara yang didatangi pengungsi.

## Sikap Negara Eropa Timur

<sup>15</sup> [http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/docs/infographics/ceas/ceas\\_infographics\\_a4\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/docs/infographics/ceas/ceas_infographics_a4_en.pdf)

Negara-negara Eropa Timur seperti Ceko, Hungaria, Slovakia bersikap keras menolak dengan menjalankan kontrol perbatasannya dan menempatkan militer untuk menjaga perbatasan dari aliran pengungsi. Bahkan Hungaria memberlakukan "negara dalam kondisi darurat", yaitu penahanan bagi imigran ilegal serta menolak kebijakan kuota Uni Eropa.

### **Sikap Inggris**

Inggris bersikap skeptis dan memperingatkan akan adanya gelombang pengungsi yang menyeberang ke Inggris, namun masyarakat sipil justru mendorong penerimaan pengungsi melalui gerakan "refugee welcome". Inggris akhirnya menyepakati sejumlah tertentu (20.000 orang) dari kuota yang ditawarkan selama jangka waktu 5 tahun.

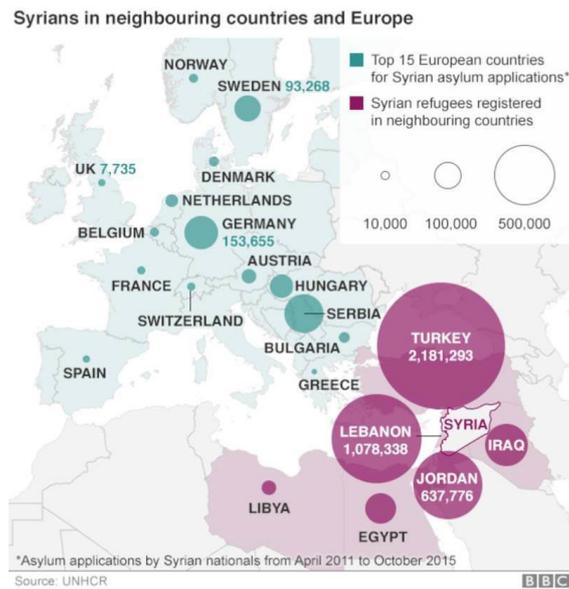
### **Sikap Jerman**

Keterbukaan sikap Jerman terhadap para pengungsi setidaknya nampak dari pernyataan pemerintah melalui PM Jerman Angela Merkel yaitu "terbuka" dan "siap menerima" para pengungsi sehingga mendorong mayoritas pengungsi Suriah bergerak menuju negara tujuan utama Jerman. Lebih dari 800.000 orang diprediksi akan meminta suaka dan 4 kali lebih besar dari angka tahun 2014. Jerman melaksanakan sistem kuota untuk mendistribusikan para pencari suaka ke negara bagiannya berdasarkan pendapatan pajak dan kepadatan penduduk.<sup>16</sup> Selain Jerman (Eropa), pengungsi Suriah juga mengalir ke negara tetangga seperti Turki, Lebanon dan Yordania.

---

<sup>16</sup> <http://www.bbc.com/com/news/world-europe-34131911>

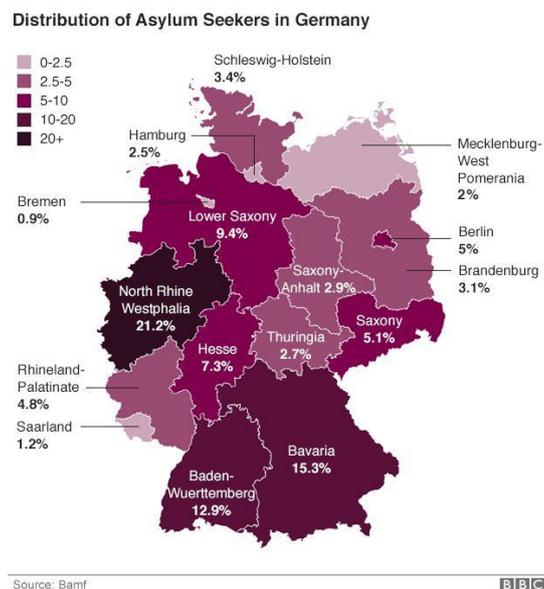
## Peta 4. Pengungsi Suriah di Negara Tetangga dan Eropa



Sumber: BBC

Gambaran distribusi pencari suaka di negara bagian Jerman adalah sebagai berikut:

## Peta 5. Distribusi Pencari Suaka di Jerman



Sumber: BBC

Namun dengan berjalannya waktu, nampaknya kebijakan Jerman juga mulai mengalami perubahan. Dinamika tersebut terlihat dari beberapa kebijakan yang

dikeluarkan pada September 2015, yaitu (i) Jerman memperketat jalur perbatasan di sebelah selatan yang berbatasan dengan Austria sejak 13 September 2015; (ii) Jerman menghentikan perjalanan kereta api (moratorium) dari dan menuju Austria selama 13 jam untuk mengembalikan prosedur bagaimana imigran/pengungsi masuk ke Jerman. Namun survei juga menunjukkan bahwa warga Jerman tidak merasa keberatan. Enampuluh satu persen (61%) warga Jerman tidak khawatir terkait meningkatnya jumlah pengungsi, sedangkan 38 persen mengatakan mereka takut akan ancaman pengungsi dari Suriah dan Irak.

Simpulan lain menunjukkan ada 4 dari 5 warga Jerman mengatakan kehidupan sehari-hari mereka tidak berubah sama sekali karena arus pengungsi imigrasi Suriah, hanya dua persen mengatakan hidup mereka jelas dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah pengungsi.<sup>17</sup> Dari berbagai sumber informasi dapat disimpulkan bahwa meskipun Jerman seolah melakukan "pengetatan" seleksi pengungsi namun tindakannya didorong oleh 2 pertimbangan utama, yaitu (i) dorongan kemanusiaan dan adanya kemampuan finansial dan manajemen untuk menyelesaikan masalah pengungsi; (ii) kebutuhan akan tenaga kerja dengan keterampilan tinggi, mengingat mayoritas adalah *skilled-labour* di negaranya; sementara Jerman mengalami penurunan tenaga kerja.<sup>18</sup>

## **Uni Eropa**

Pemimpin Uni Eropa tidak akan mampu mengeluarkan kebijakan pengungsi yang tidak didukung oleh anggotanya. Pemerintah negara inti mempunyai preferensi kebijakan masing-masing, namun Parlemen Eropa menjadi faktor menentukan juga dalam pengambilan keputusan.

Presiden Uni Eropa Jean-Claude Junckers mengeluarkan kebijakan kuota dengan rencana total penerimaan mencapai 160.000 pengungsi dibagi sesuai kuota besarnya penduduk masing-masing negara. Juncker juga mengkritik sikap para

---

<sup>17</sup> <http://blog.act.id/3-kebijakan-terbaru-eropa-untuk-pengungsi-suriah-dan-irak/>

<sup>18</sup> Leonid Bershidsky, "Want to get Richer? Then Take More Refugees:.. The Jakarta Post November 29, 2015, p 5. Diperkirakan bahwa Jerman sebagai penerima terbesar pencari suaka Suriah akan menikmati peningkatan output ekonomi sebesar 0,2% tahun depan jika menampung 800.000 pengungsi pada 2015; itu merupakan 12,5% harapan pertumbuhan Jerman pada 2016.

pemimpin Eropa yang menolak usulan tersebut meskipun parlemen Eropa menyetujuinya. Seperti yang tertulis oleh surat kabar liberal Der Standard:

*"In practical terms, all the tripling of the funding for the border security programme Triton will accomplish is a return to Italy's national Mare Nostrum programme. It saved thousands of lives, but was stopped at Germany's insistence. Juncker's call for a quota system for asylum seekers is also right. The Union must follow this path if it wants to avoid destroying its own reputation as a humane society. The heads of state and government plan to distribute 5,000 refugees 'fairly' in an EU-wide pilot project. That cannot be the answer. The EU has a population of 507 million. That would mean one refugee per 100,000 inhabitants. Austria would have to take in 80 EU refugees', and Vienna – with a population of 1.8 million – just enough people to fill a small bus. Have we got screw loose somewhere?"*

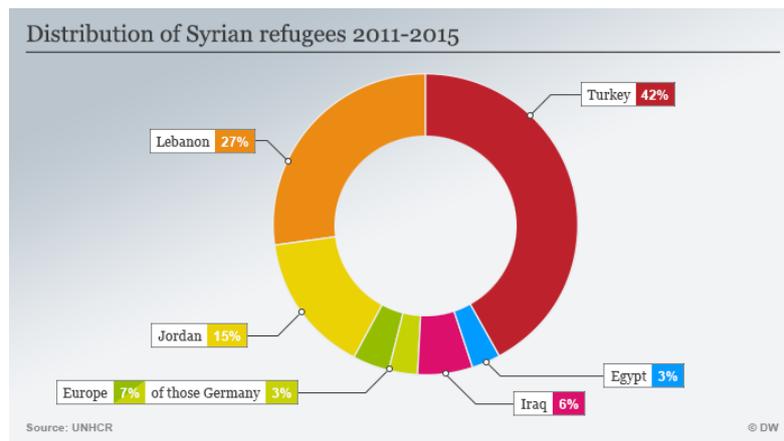
Selain itu dalam pembicaraan dengan para kepala negara anggota, Uni Eropa berniat bekerja sama dengan Turki untuk membentuk zone aman bagi pengungsi di perbatasan Suriah-Turki, dimana sebesar 2 juta pengungsi akan ditampung Turki dengan bantuan 1 milyar Euro. Namun Turki masih meminta konsesi lain yaitu imbalan yang lebih besar, kerja sama yang lebih luas dalam penanggulangan terorisme dari ISIS/ISIL (the Islamic State of Iraq and al-Sham) dan pemberontak Kurdil serta kemudahan pemberian visa bagi warga Turki ke EU serta perundingan kembali keanggotaan Turki dalam EU.<sup>19</sup> Sejauh ini Turki merupakan penampung pengungsi Suriah terbesar dan mencapai 42% dari total pengungsi.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> <http://www.dw.com/id/eropa-rangkul-turki-atasi-krisis-pengungsi/a-18784659>

<sup>20</sup> <http://www.dw.com/id/turki-dan-eropa-sepakati-kerjasama-atasi-pengungsi/a-18786492>

Gambar 2. Distribusi Pengungsi Suriah Periode 2011-2015



Sumber: UNHCR

## UNHCR

UNHCR membuka diri terhadap proposal yang dikeluarkan UE pada September 2015 untuk mengatasi krisis pengungsi di Eropa. Proposal meliputi antara lain **skema relokasi** (*relocation scheme*)<sup>21</sup> bagi 160.000 pengungsi dari Yunani, Italia dan Hungaria hingga tahun 2016 dimana diharapkan semua anggota UE terlibat dalam inisiatif ini dan diterapkan sebagai tindakan “darurat”. UNHCR juga terbuka terhadap program relokasi permanen dimana kebutuhan pengungsi, kualifikasi spesifik dan preferensi harus dipertimbangkan dalam proses relokasi. Proses relokasi hanya berhasil jika disertai (i) resepsi darurat dalam skala besar (*large scale emergency reception*), (ii) bantuan dan usaha registrasi (*assistance and registration efforts in the countries most impacted by arrivals*) di negara paling terdampak pengungsi, seperti Yunani (Lesvos, Kos, Athena), Hungaria, dan Italia.

Dalam rangka mendukung pemerintah negara-negara terdampak, UE juga diharapkan dapat memobilisasi lembaga suaka, migrasi dan perlindungan sipil dan mekanisme untuk tujuan tersebut termasuk sumber daya dari negara anggota dengan dukungan UNHCR, IOM dan masyarakat sipil. Penting juga mengaktifkan EU Temporary Protection Directive 2001/55/EC (TPD) – yaitu pengaturan standar minimum untuk memberikan perlindungan sementara dalam kasus pengungsi

<sup>21</sup> [www.unhcr.org/55f28c4c9.html](http://www.unhcr.org/55f28c4c9.html)

masal dan pengaturan berimbang antara negara anggota dalam menerima pengungsi.

Pengaturan praktis juga harus dipertimbangkan untuk mengatasi situasi orang-orang yang menolak identifikasi dengan menggunakan insentif positif pelaksanaan pendaftaran di lokasi pertama tiba (termasuk konseling perorangan dan keluarga, penyediaan informasi, hak tinggal jangka pendek bagi yang tidak bisa kembali). Langkah lain termasuk pengesahan the Long-Term Residence Directive (LTRD) untuk memungkinkan mobilitas lebih besar dalam UE.

UNHCR juga mendukung *channel legal* untuk migrasi; yang terbuka juga bagi orang yang membutuhkan proteksi internasional. UNHCR mendorong negara anggota untuk memperluas kesempatan ini bagi pengungsi dengan memperluas *resettlement*, penyatuan keluarga, visa humanitarian dan skema migrasi bagi pekerja dan pelajar pengungsi. UNHCR juga melihat perlunya pengaturan yang kuat bagi mereka yang terlibat dalam lingkaran penyelundupan/perdagangan ilegal paralel dengan perluasan pengaturan untuk memasuki Eropa.

UNHCR juga tidak keberatan mengenai *safe countries of origin concept* sepanjang negara tersebut dapat dihapus dengan cepat dari daftar ketika tidak lagi dianggap aman. Bagi orang yang tidak membutuhkan proteksi internasional, UNHCR juga mendukung kebijakan pengembalian yang efektif. Yang paling mendasar UNHCR juga melihat perlunya melihat referensi analisis sebab-sebab paling mendasar munculnya "*forced displacement*" dimana dibutuhkan respons yang komprehensif terhadap masalah pengungsi baik dalam bentuk diplomasi, kemauan, politik, pencegahan, maupun resolusi konflik.

## **Kesimpulan**

Menghadapi masalah pengungsi yang bersifat kompleks, Uni Eropa harus menghadapi berbagai sikap negara inti karena berbedanya cara pandang dan kepentingan dari masing-masing negara anggota. Negara dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan akan tenaga kerja terampil serta pertimbangan kemanusiaan – setelah ribuan korban meninggal – seperti Jerman, Swedia

mempunyai kebijakan "pintu terbuka" bagi para pengungsi. Negara dengan kemampuan sumber daya dan ekonomi terbatas seperti Ceko, Hungaria, Slovakia akan menerapkan kebijakan "pintu tertutup". Negara lain seperti Inggris, Perancis meskipun dari segi sumber daya mampu namun karena pertimbangan keamanan dan sikap penolakan masyarakat (gejala "Islamphobia") menerapkan kebijakan "bergaining" (tawar menawar) menerima pengungsi namun dalam jumlah terbatas.

Uni Eropa sebagai lembaga supra nasional, ternyata tidak seluruhnya mampu mengatasi berbagai perbedaan pendapat negara inti dan membuat kebijakan yang ditaati oleh negara anggota. Atas nama kemanusiaan, UE mendorong kebijakan pembagian kuota untuk penerimaan jumlah pengungsi kepada 28 negara anggotanya serta mendukung langkah-langkah "darurat", jangka menengah dan jangka panjang, lokal, regional maupun internasional; misalnya memberi bantuan keuangan kepada Yunani dan Italia sebagai negara tujuan utama bagi pengungsi yang menyeberang melalui laut Mediterania, memperkuat satuan tugas laut untuk menyelamatkan kapal-kapal pengungsi, melakukan berbagai upaya kerja sama dengan lembaga internasional UNHCR dan IOM, menata prosedur masuk bagi imigran, merencanakan langkah-langkah integrasi bagi pengungsi yang diterima serta melakukan kerja sama internasional dengan Turki untuk mengurangi dan membendung imigran ke Eropa.

Bagi UE kerja sama dengan lembaga internasional seperti UNHCR, IOM dan berbagai NGO terbukti sangat bermanfaat selain inisiatif dan kerja sama negara inti dalam mengatasi masalah secara langsung. Kerja sama antar lembaga memberikan "payung" regulasi tindakan bersama sementara aksi negara inti menjadi bagian dari "follow-up" (tindak lanjut) kebijakan dari tingkat supranasional ke tingkat nasional/lokal.

## DAFTAR PUSTAKA

Herindrasti, Sinta. "Politik Pengungsi di Eropa: Dilema antara Norma dan Realitas". The 3rd Convention of European Studies, Yogyakarta 2014.

Bershidsky, Leonid. "Want to get Richer? Then Take More Refugees". The Jakarta Post November 29, 2015.

Macdonald, Alastair and Francesco Guarascio. "Fly, Don't Walk, EU will Urge Balkan Migrants". The Jakarta Post, October 28, 2015.

Taylor, Paul. "Refugees Migrant Crisis Spurs Solidarity vs Security Risk to Europe's Unity". The Jakarta Post, October 28, 2015.

<http://blog.act.id/3-kebijakan-terbaru-eropa-untuk-pengungsi-suriah-dan-irak/>

<http://www.bbc.com/news/world-europe-34131911>

<http://www.academia.edu/12314043/GARIS> Besar Perjanjian Schengen Maastricht dan Amsterdam

<http://www.bbc.com/news/world-europe-24521614>

<http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/09/150914> dunia pengungsi hukum

[www.unhcr.org/55f28c4c9.html](http://www.unhcr.org/55f28c4c9.html)

<http://www.dw.com/id/eropa-rangkul-turki-atasi-krisis-pengungsi/a-18784659>

<http://www.dw.com/id/turki-dan-uni-eropa-sepakati-kerjasama-atasi-pengungsi/a-18786492>

<http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e->

[library/docs/infographics/ceas\\_infographics\\_a4\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/docs/infographics/ceas_infographics_a4_en.pdf)

[www.businessinsider.co.id/map-of-europe-refugee-crisis-2015-9/](http://www.businessinsider.co.id/map-of-europe-refugee-crisis-2015-9/)